

# ISU Sepekan

BIDANG POLITIK DALAM NEGERI

Minggu ke-4 Desember 2021 (17 Desember s.d 23 Desember 2021)

## PENGUATAN KEAMANAN MARITIM

### LAUT NATUNA UTARA

Aulia Fitri

Peneliti Pertama/Studi Pertahanan

aulia.fitri@dpr.go.id



Pusat Penelitian Badan Keahlian  
Sekretariat Jenderal DPR RI

#### ISU ATAU PERMASALAHAN

Pemerintah China mengirimkan surat protes yang meminta Indonesia menghentikan kegiatan pengeboran sumber daya gas dan minyak di Kawasan Laut Natuna Utara dan latihan militer Garuda Shield. Melalui konsep 'sembilan garis putus-putus' atau *nine-dash-line*, China selama ini sudah mengklaim hampir seluruh wilayah Laut China Selatan, yakni sekitar 90% yang meliputi area seluas sekitar 3,5 juta kilometer persegi (1,4 juta mil persegi). Klaim teritorial sepihak China di Laut China Selatan sendiri kerap bersinggungan dengan Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) yang dimiliki oleh Indonesia (perairan Natuna), beberapa negara ASEAN lainnya, serta Taiwan. Tercatat, beberapa kali kapal patroli China dilaporkan memasuki wilayah ZEE milik Indonesia. Perairan Natuna memiliki nilai strategis bagi Indonesia. Selain merupakan salah satu batas terluar NKRI, wilayah ini menyimpan kekayaan alam yang cukup melimpah. Letak strategis dan kekayaannya berpotensi menimbulkan pelanggaran wilayah oleh negara lain yang dilakukan secara sistematis, baik ancaman militer maupun nirmiliter.

Walaupun menyatakan diri sebagai *non-claimant state*, namun respons pemerintah Indonesia terhadap dinamika yang terjadi di Laut Cina Selatan cenderung bersifat antisipatif. Hal ini terlihat dari perubahan nama Laut Cina Selatan menjadi Laut Natuna Utara pada tahun 2017, mendorong terbentuknya *Declaration of Conduct* untuk mengatur lalu lintas kelautan di wilayah sengketa, menempatkan angkatan bersenjata untuk patroli, mendirikan satuan Komando Wilayah Gabungan Pertahanan di wilayah Natuna, serta upaya-upaya diplomatis baik secara bilateral ataupun regional melalui ASEAN.

Tidak dapat dipungkiri bahwa upaya diplomasi merupakan cara yang paling bijaksana untuk mengatasi konflik di Laut Natuna Utara, mengingat besarnya dampak keamanan yang mungkin ditimbulkan juga pengaruhnya terhadap kondisi perekonomian. Sayangnya, upaya tersebut saja belum cukup untuk menyelesaikan tumpang tindih klaim maupun berbagai aksi pelanggaran yang terjadi di Laut Natuna Utara. Oleh karena itu upaya tersebut perlu didampingi dengan penguatan kapasitas pertahanan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari upaya diplomasi pemerintah. Posisi Indonesia sendiri sebenarnya tidak menginginkan terjadinya konflik bersenjata di wilayah ini. Sekalipun opsi penggunaan militer juga dipersiapkan sebagai bentuk antisipasi apabila dinamika keamanan semakin memburuk.

#### SUMBER

Kompas, 21 Desember 2021; Tribun News, 21 Desember 2021; Tempo, 22 Desember 2021.